



KEMNAKER

Kementerian Ketenagakerjaan

PERCEPATAN IMPLEMENTASI PETA JALAN MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK 2045



Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan
Rinaldi Umar, S.H. M.H.



Pemerintah Indonesia bersama para pemangku kepentingan telah menyusun **Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2045** sebagai kerangka strategis jangka panjang untuk menghapus pekerja anak di seluruh sektor.

Peta jalan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, pelibatan dunia usaha dan masyarakat sipil, serta integrasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah.



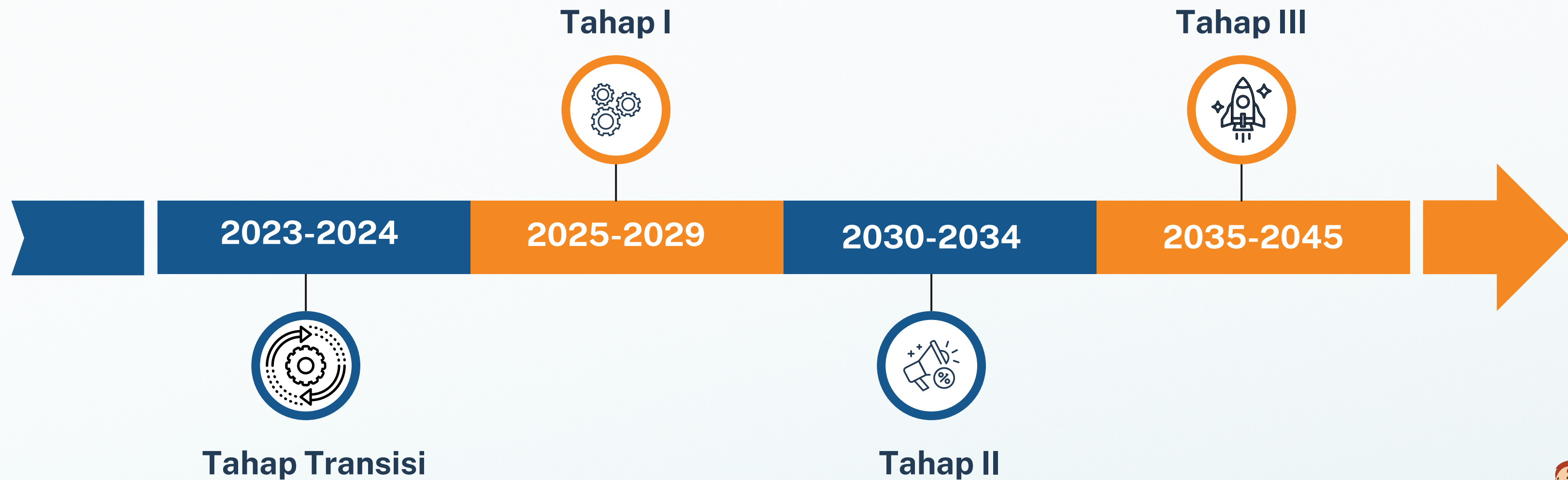
TUJUAN PETA JALAN



Mencapai Indonesia bebas dari pekerja anak pada tahun 2045 dengan menurunkan angka pekerja anak secara bertahap. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Maju Tanpa Pekerja Anak



TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN PETA JALAN (ROADMAP) INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK



TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK



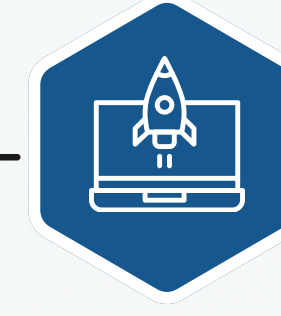
Memastikan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan, dilaksanakan secara nasional



Mensinergikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dengan semua kementerian/ lembaga kunci, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait termasuk mendorong keterlibatan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja/buruh, media, akademisi, dan keterlibatan forum anak.



Advokasi untuk memastikan tersedianya anggaran kementerian/ lembaga utama dan pemerintah daerah/provinsi/ kabupaten/kota hingga pemerintahan desa



Mendokumentasi kan semua pelaksanaan dan praktik baik yang dilakukan pemangku kepentingan



Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan



KEMNAKER

LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI



**Keterlibatan
Stakeholder**



**Peningkatan
Pemahaman**



**Penarikan Pekerja
Anak**



**Pengawasan &
Pemantauan**



KEMNAKER

6 PILAR ROADMAP INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

- > Harmonisasi standar dan peraturan perundang undangan tentang pekerja anak, serta penegakan hukum
- > Aksesibilitas program pendidikan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja yang efektif
- > Perlindungan sosial untuk semua
- > Memperkuat sistem data dan informasi pekerja anak secara nasional
- > Pelembagaan upaya penanggulangan pekerja anak di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan desa
- > Kemitraan multi pihak



KETERKAITAN ASTA CITA DENGAN PEKERJA ANAK

Asta Cita memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan perlindungan warga negara. Seluruh tujuan ini memiliki hubungan erat dengan upaya penghapusan pekerja anak.



KEMNAKER



KETERKAITAN ASTA CITA DENGAN PEKERJA ANAK

- 1** Fokus Asta Cita pada peningkatan kualitas SDM menegaskan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan, bukan bekerja. Pekerja anak menghambat kemampuan Indonesia menciptakan generasi unggul.
- 2** Cita untuk mengurangi kemiskinan sangat relevan karena kemiskinan merupakan penyebab utama anak terpaksa bekerja. Dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, risiko pekerja anak akan menurun.
- 3** Asta Cita menekankan perlindungan sosial, yang membantu keluarga rentan sehingga anak tidak perlu bekerja.
- 4** Penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik mendukung implementasi aturan perlindungan anak dan pengawasan praktik pekerja anak.



KETERKAITAN ASTA CITA DENGAN PEKERJA ANAK

- 5** Pembangunan ekonomi yang berkeadilan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketika lapangan kerja layak bagi orang dewasa tercipta, pekerja anak otomatis berkurang. Ekonomi berkeadilan mengurangi ketimpangan yang memaksa anak bekerja.
- 6** Pembangunan desa dan daerah tertinggal dalam Asta Cita meningkatkan akses pendidikan dan ekonomi, sehingga mengurangi faktor pendorong pekerja anak.
- 7** Revolusi mental dan penguatan karakter bangsa juga mendukung perubahan budaya masyarakat agar menghargai hak anak.
- 8** Penguatan peran negara dalam perlindungan warga negara menunjukkan bahwa Negara hadir dalam melindungi warga, termasuk anak. Penghapusan pekerja anak adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam pemenuhan hak anak. Program pemerintah yang pro-anak selaras dengan visi ini.





PERAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- Melakukan pembinaan, pemeriksaan norma kerja anak dan penegakan hukum bagi yang melibatkan/mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).
- Melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait seperti Kementerian/Lembaga dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja/buruh, media, akademisi, dan keterlibatan forum anak.
- Penyediaan kanal pengaduan jika ditemukan kasus pekerja anak, yang terintegrasi pada mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
- Penguatan *leading* sektor sebagai implementator dan koordinator Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan sesuai dengan capaian peta jalan.

PERAN DUNIA USAHA/ SEKTOR BISNIS



Mendorong perusahaan untuk membangun standar operasional prosedur mengenai pencegahan pekerja anak di lingkungan perusahaan (kebijakan rekrutmen)



Mendorong perusahaan untuk memastikan pencegahan pekerja anak di sepanjang jalur rantai pasok perusahaan



Mendorong perusahaan untuk merumuskan program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak termasuk memberi perhatian pada penanganan pekerja anak. Kunci dalam penanggulangan pekerja anak, termasuk pelibatan forum/kelompok anak



KEMNAKER



PERAN SERIKAT KERJA

- Mendukung pencegahan pekerja anak dengan cara memantau dan mensosialisasikan pelarangan rekrutmen anak di tempat kerja.
- Mendorong Pengusaha untuk memasukkan isu pekerja anak dalam setiap kebijakan perusahaan (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama).
- Menginformasikan kepada pihak yang berwenang (Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Kepolisian) jika ditemukan kasus pekerja anak.

HARAPAN IMPLEMENTASI ROADMAP



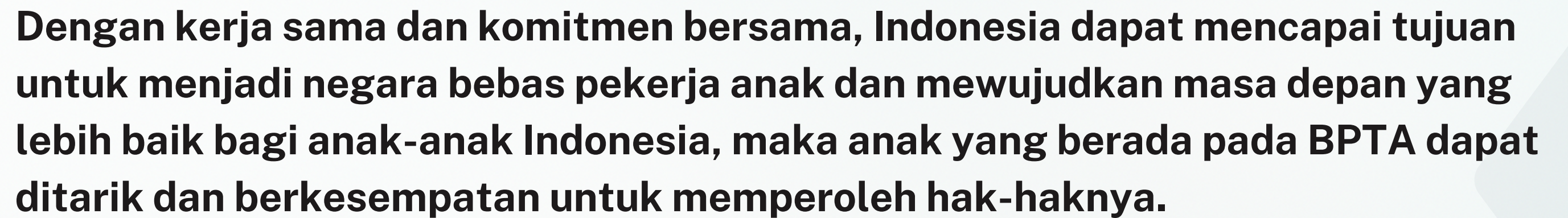
**Menghapuskan
Pekerja Anak Secara
Bertahap**



**Meningkatkan Akses
Pendidikan bagi
Anak-Anak**



**Melindungi Anak dari
Kekerasan dan
Eksploritasi**



Sinergi, kolaborasi dan koordinasi semua pihak merupakan prasyarat utama percepatan implementasi peta jalan (roadmap) ini. Peran multipihak harus mampu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan “INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK 2045”

TERIMA KASIH

